

STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

ARCHIPELAGO SEA DEFENSE STRATEGY IN REALIZING INDONESIA AS A WORLD OF MARITIME AXIS

Basri Mustari¹, Supartono², Rayanda Barnas³

Prodi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

(basri.mustari90@gmail.com, tonnret@yahoo.com, ray.barnas@yahoo.com)

Abstrak – Poros Maritim Dunia (PMD) mulai dicetuskan sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI pada tahun 2014, beberapa hal yang dijadikan dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diantaranya letak geografis Indonesia yang berada pada persilangan samudera Hindia dan samudera Pasifik serta antara benua Asia dan benua Australia. Posisi Indonesia yang strategis tersebut tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan samudera Pasifik dan samudera Hindia agar kedua kawasan tersebut tetap damai dan aman bagi pengguna jalur perdagangan dunia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut mempunyai peran penting untuk menjaga kepentingan bangsa Indonesia di laut dan menjamin keamanan bagi para pengguna laut. Melalui strategi pertahanan laut nusantara (SPLN) yang dimiliki oleh TNI AL sejak tahun 2004 perlu diketahui sejauh mana SPLN dapat mewujudkan lima pilar utama yang terdapat pada poros maritim dunia. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis, penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada beberapa narasumber terkait dengan sejauh mana SPLN dapat mewujudkan poros maritim dunia yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa SPLN tidak sepenuhnya dapat mewujudkan poros maritim dunia karena tujuan SPLN hanya untuk operasi pengendalian laut dan penangkalan, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan SPLN dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan lima pilar utama poros maritim dunia.

Kata Kunci: Strategi, Pertahanan Negara di Laut, Poros Maritim Dunia

Abstract - The World Maritime Axis (WMA) began to be initiated since the election of Joko Widodo as President of the Republic of Indonesia in 2014, a number of things that became the basis for making Indonesia as the WMA, including Indonesia's geographical location in the Indian Ocean and Pacific Ocean crossing and between the Asian continent and the Australian continent. Indonesia's strategic position is certainly of interest to determine the future of the Pacific and Indian oceanic regions so that the two regions remain peaceful and safe for users of world trade routes. In order to realize Indonesia as a WMA, the Navy as a major component of the country's defense at sea has an

¹ Basri Mustari adalah Mahasiswa Universitas Pertahanan 2017 Fakultas Strategi Pertahanan, Prodi Strategi Perang Semesta

² Laksda TNI Dr. Ir Supartono, M.M adalah Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pertahanan 2018. Pembimbing 1

³ Kolonel Lek Rayanda Barnas, M.Si (Han) adalah Analis Madya Bidang Manajemen SDM Satwas Universitas Pertahanan 2018. Pembimbing 2

important role to play in safeguarding the interests of the Indonesian people at sea and ensuring security for marine users. Through the Archipelago Sea Defense Strategy (ASDS) owned by the Indonesian Navy since 2004, it is necessary to know the extent to which the ASDS can realize the five main pillars contained in the WMA. By using phenomenological qualitative methods, the author obtains data through direct interviews with several informants related to the extent to which the ASDS can realize the WMA, the results of which can be concluded that ASDS cannot fully realize the WMA because the purpose of ASDS is only for sea control and deterrence operations, so required improvement of ASDS and cooperation between relevant ministries and institutions to realize the five main pillars of the WMA

Keywords: Strategy, State of Defense at Sea, World Maritime Axis

Pendahuluan

Strategi sebagai penjabaran doktrin secara umum merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh para pemimpin tertinggi yang difokuskan pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. *“Strategy is the bridge that relates military power to political purpose. it is neither military power per se nor political purpose. by strategy mean the use that is made of force and the threat of force for the end of policy”*⁴ strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan politik negara (ends) yang menggunakan kekuatan militer sebagai cara (ways), namun hal ini bukan kekuatan militer atau tujuan politik semata, namun penggunaan kekuatan militer merupakan tujuan akhir dari suatu kebijakan politik negara.

Kekuatan militer sebagai alat atau sarana merupakan tujuan akhir dalam rangka untuk mencapai tujuan politik suatu negara. Tujuan yang ingin dicapai diperlukan suatu cara dan rencana yang tepat, cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau Ends, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut atau Ways atau dan sarana prasarana serta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau Means.⁵ Di dalam konteks pertahanan negara Indonesia, strategi merupakan penjabaran dari doktrin pertahanan negara yang dirumuskan berdasarkan perjalanan sejarah bangsa dan pengalaman masa lalu, masa kini, serta berorientasi visioner yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan

⁴ Clausewitz, Carl von. 1984. *On War*. (Terj. dari *Vom Kriege*. Princeton University Press. Michael Howard dan Peter Paret). New York: Oxford University Press.

⁵ Lykke, Arthur F, 1997. *“Defining Military Strategy”* dalam *Military Review* No 77 Vol 1.

lingkungan strategis.⁶ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan letak geografi yang strategis, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno yang dapat dikatakan sebagai doktrin maritim yaitu:

"Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri."⁷

Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang berawal dari kondisi dan letak geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Selain hal tersebut konsep poros maritim juga dilandasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara geopolitik, historis dan budaya, Indonesia dapat menjadi negara maritim karena

mempunyai jumlah pulau terbanyak dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia.⁸

Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentu mempunyai kepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia agar tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia agar tidak dijadikan sebagai ajang perebutan sumber daya alam dan konflik wilayah. Untuk menjaga kepentingan dan keamanan maritim Indonesia maka diperlukan upaya pemberdayaan potensi maritim nasional guna menciptakan pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah Indonesia mencanangkan Poros Maritim Dunia yang memiliki lima pilar yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan melalui diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.⁹

⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015. Strategi Pertahanan Negara Indonesia. Kemhan RI, Jakarta.

⁷ Lipi, 2015. Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia 2015 pada <http://lipi.go.id> di akses pada September 2018.

⁸ Limbong, B. 2015. Poros Maritim. Margaretha Pustaka, Jakarta.

⁹ Joko Widodo, 2014. Deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar pada

Membangun pilar utama tersebut diatas bermakna bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, tetapi juga harus memiliki peran dan pengaruh terhadap lingkungan internasional. Kebijakan pembangunan menjadi Poros Maritim Dunia dapat kita lihat juga pada nawacita yang pertama yaitu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”

Visi tersebut menjadi landasan dalam pembangunan pertahanan negara sebagai upaya menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain adalah perlunya diperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional sesuai

dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi.”¹⁰

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Poros Maritim Dunia, maka TNI AL sebagai komponen utama kekuatan pertahanan negara di laut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang melalui strategi pertahanan nagara di laut yang dituangkan dalam bentuk Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN).

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)

SPLN berorientasi pada konsep negara kepulauan yang artinya pertahanan laut nusantara harus mempertimbangkan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Visi pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan suatu pemikiran yang perlu dilakukan dalam pembangunan kekuatan berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Adanya visi Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia berimplikasi pada strategi pertahanan negara termasuk SPLN.

Idealnya, SPLN yang dimiliki TNI AL yang digunakan mulai pada tahun 2004

<https://www.kemlu.go.id> di akses pada 5 Oktober 2018.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Jakarta.

melalui Surat Keputusan Kasal perlu dikaji kembali, apakah strategi tersebut sudah dapat mewujudkan ke lima pilar yang terdapat pada poros maritim tersebut. Oleh sebab itu SPLN perlu diteliti sejauh mana mampu menjawab kebutuhan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, atau perlu ada pembaharuan agar SPLN dapat mendukung tercapainya lima pilar utama visi tersebut. Sasaran SPLN adalah untuk mencegah pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI melalui laut. SPLN merupakan bagian integral dari Strategi Pertahanan Nusantara yang ditata di atas tiga pilar utama yang saling terkait yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pertahanan mendalam (*defence in depth*) dan penangkalan.¹¹

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut telah melaksanakan strategi pertahanan negara di laut dalam bentuk Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) sebelum adanya kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. SPLN merupakan penjabaran dari doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas dan fungsi TNI AL. Hal tersebut guna terwujudnya dan tertanggulangnya ancaman aspek laut, gangguan keamanan dalam negeri, dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI agar tercipta kondisi laut yurisdiksi nasional yang aman dan terkendali. Dalam rangka mewujudkan berbagai sasaran tersebut, diterapkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara. SPLN terdiri dari Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*), Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*) dan Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*).

Strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, beberapa pengertian tentang strategi menurut para ahli strategi diantaranya: Strategi Craig & Grant adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long term goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.¹² Pearce II dan Robinson adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut,

¹¹ Markas Besar TNI AL. 2004. Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) Mabes TNI AL, Jakarta

¹² Craig and Grant, 1996. Manajemen Strategi. Alex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, Jakarta.

dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan¹³

Strategi menurut David, Fred berupa sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengamatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.¹⁴ Sehingga strategi merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan bersifat secara terus menerus.

SPLN tidak terlepas dari Kekuatan Laut Indonesia dimana agar kita dapat kembali berjaya di laut, maka Indonesia harus mampu menjawab tiga hal mendasar yaitu sasaran/tujuan apa yang ingin diwujudkan (*ends*), dengan sarana prasarana apa untuk mewujudkan tujuan (*means*) serta bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut (*ways*). Untuk mewujudkan kejayaan di laut menurut Marsetio setidaknya terdapat tiga sasaran utama yang harus dicapai yaitu terwujudnya karakter bangsa maritim, terciptanya keunggulan sumber daya manusia (SDM) maritim dan berkembangnya ekonomi maritim¹⁵

Pengendalian Laut (*Sea Control*) tidak perlu dilakukan secara permanen dan meliputi seluruh wilayah laut, melainkan dapat dibatasi sesuai kebutuhan selama jangka waktu tertentu dan di daerah tertentu yang artinya bahwa apabila penguasaan laut membutuhkan kekuatan laut yang lebih unggul dalam menghadapi bentuk ancaman setiap saat. Corbett juga mengatakan bahwa terdapat batasan waktu dan tempat yang perlu dikuasai untuk kepentingan sendiri, apabila tidak mempunyai kemampuan yang memadai

¹³ Pearce II, Robinson 2008. *Manajemen Strategis*. Salemba Empat, Jakarta.

¹⁴ David, F. R, 2011. *Strategic Management*. Buku 1. Edisi 12. Salemba Empat, Jakarta.

¹⁵ Marsetio, 2014. *Sea Power Indonesia*. Universitas Pertahanan, Jakarta.

maka dapat dilakukan upaya-upaya agar pihak lain tidak dapat memanfaatkan wilayah laut tersebut untuk kepentingannya. Dalam konteks keamanan laut, hal ini berarti suatu negara tidak perlu untuk terus-menerus menghadirkan kekuatan laut di seluruh wilayahnya, tetapi dapat memanfaatkan teknologi pengawasan dan kekuatan laut siaga untuk mencegah ancaman terhadap kepentingan negara di laut.¹⁶

Peran Angkatan Laut menurut Ken Booth dimana Angkatan Laut di seluruh dunia pada dasarnya memiliki peran baik di masa damai maupun di masa perang. Konsep ini dirumuskan berdasarkan sejarah penggunaan kekuatan laut oleh berbagai negara dalam sejarah. Peran utama Angkatan Laut (*navy*) adalah sebagai kekuatan militer yang bertugas untuk melindungi negara dan bangsa dari ancaman militer.

Ken Booth mengatakan bahwa Angkatan Laut secara umum (*universal*) mempunyai tiga peran dalam melaksanakan tugasnya yaitu: Peran Militer (*Millitary*), Peran Diplomasi (*Diplomacy*), Peran Polisionil (*Constabulary*).

¹⁶ Corbett, J. S. 2015. *Some Principles of Maritime Strategy*. Middletown, USA.

Penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan dilaksanakan untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara Haneg dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga merupakan peran miter.

Kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Peran diplomasi angkatan laut dilaksanakan dengan cara yang positif melalui interaksi dan kerja sama dengan negara sahabat seperti latihan dan operasi bersama, pertukaran personel, maupun forum-forum kerjasama multilateral sebagai wadah untuk melaksanakan diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah.

Peran Polisionil merupakan peran di masa damai angkatan laut dalam bentuk penegakan hukum nasional dan internasional di laut maupun

melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang (OMSP). Penegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil Angkatan Laut meliputi spektrum penugasan yang sangat luas meliputi pengawasan dan kehadiran di laut yurisdiksi nasional dalam bentuk patroli, Search and Rescue (SAR), bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta perlindungan kelestarian alam dan sumber daya di laut.

Pembahasan

Pada kajian ini, pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan SPLN dalam mewujudkan PMD, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dan kajian yang relevan terkait dengan PMD serta berdasarkan rumusan masalah.

SPLN merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi TNI AL bidang operasional yang sarannya adalah untuk mencegah pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan

keutuhan wilayah NKRI melalui laut. Apabila kita mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, maka SPLN dalam mewujudkan PMD dapat digambarkan bahwa yang menjadi tujuan akhir (*Ends*) dari SPLN adalah terwujudnya lima pilar yang terdapat pada PMD yang berarti keterkaitan SPLN dalam rangka membangun budaya maritim sesungguhnya tidak ada hubungan diantara keduanya, namun pada tugas TNI AL membangun budaya maritim dapat diwujudkan melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar) oleh Dinas Potensi Maritim TNI AL.

Pengelolaan sumber daya laut sebagai pilar kedua dapat ditemukan sasaran SPLN bukan untuk mengelolah sumber daya laut, tetapi dalam hal menjaga sumber daya laut secara langsung dapat diwujudkan oleh SPLN karena sasaran SPLN adalah mengamankan dan mengendalikan laut dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran aspek laut, termasuk pilar ke tiga yaitu membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Oleh karena ke tiga pilar tersebut tidak dapat diwujudkan dengan SPLN yang ada saat ini, maka perlu adanya penyesuaian agar SPLN dapat mewartakan dan mewujudkan ke tiga pilar tersebut serta diperlukan kerjasama

dengan Kementerian dan Lembaga pemerintah yang terkait dengan ke tiga pilar tersebut, karena apabila kita melihat tujuan dari SPLN maka tidak semua pilar yang terdapat pada PMD dapat diwujudkan dengan SPLN tetapi dalam hal mengamankan agar kelima pilar tersebut dapat terwujud, tentu SPLN sudah cukup meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti terbatasnya alutsista, dan sistem kontrol. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara TNI AL dan kementerian dan lembaga terkait untuk saling melengkapi apa yang menjadi kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan pemerintah terkait dengan PMD dapat terwujud.

Diplomasi maritim adalah salah satu bentuk operasi pada SPLN sehingga secara langsung pilar ke empat ini dapat terwujud melalui SPLN, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang TNI tahun 2004 salahsatu tugas TNI AL adalah melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷

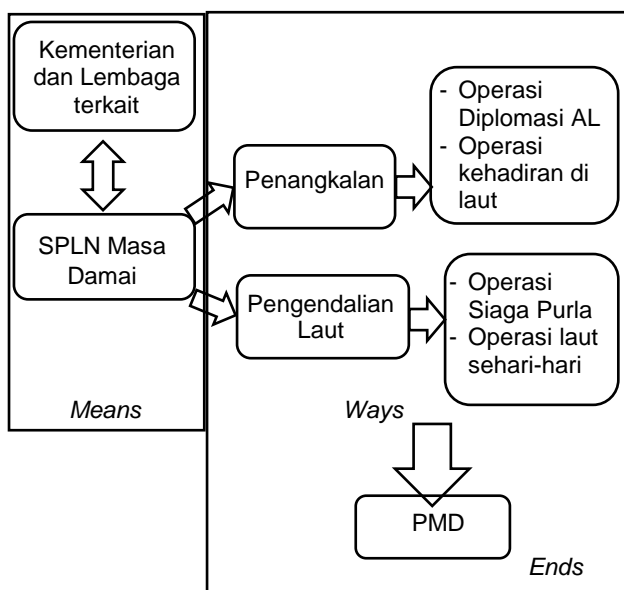
Membangun kekuatan pertahanan maritim. Strategi membangun

pertahanan maritim Indonesia adalah cara (*ways*) untuk mencapai tujuan pertahanan nasional (*ends*) dan sumberdaya, sarana yang dibutuhkan (*means*) untuk melaksanakan strategi tersebut adalah kekuatan pertahanan maritim yang dibangun dengan tepat untuk melaksanakan strategi pertahanan maritim.

Pembangunan kekuatan pertahanan maritim meliputi tiga aspek penting yaitu personel, struktur kekuatan, dan konsep. Kunci dari kemampuan pertahanan maritim Indonesia adalah personel yang mengawaki peralatan. Untuk membina profesionalisme personel, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkesinambungan. Profesionalisme yang ditunjang dengan kesejahteraan bagi prajurit dan keluarganya merupakan prioritas dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Perangkat keras berupa peralatan utama sistem senjata (Alutsista), peralatan lain, dan infrastruktur pendukung merupakan sarana utama dari pembinaan kemampuan pertahanan. Kekuatan pertahanan maritim digunakan sesuai strategi pertahanan maritim dengan menggunakan konsep-konsep operasional yang selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi,

¹⁷ Undang-undang R I Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

perubahan ancaman, dan tuntutan tugas yang dihadapi. Pelaksanaan latihan dan evaluasi yang realistis merupakan dasar dari pengembangan konsep-konsep operasional yang sesuai dengan strategi pertahanan maritim. Dari penjelasan pilar-pilar PMD tersebut diatas dapat di ilustrasikan sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Ends-Ways dan Means SPLN terkait dengan PMD
 Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

Tiga pilar lain dalam PMD tidak secara langsung didukung dan menjadi bagian dari SPLN, namun didukung melalui peran dan fungsi TNI AL yaitu melalui Dinas Potensi Maritim TNI AL bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait. Upaya mewujudkan ke lima pilar PMD tidak akan dicapai dengan hanya melalui SPLN TNI AL saja, karena SPLN terbatas hanya pada

aspek operasional yang dilakukan oleh TNI AL dalam rangka mengamankan dan mengendalikan laut Indonesia agar seluruh kegiatan yang terkait dengan pilar PMD dapat berjalan dengan aman dan lancar, oleh sebab itu maka diperlukan adanya sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga pemerintah termasuk unsur maritim lainnya, namun pada internal TNI AL upaya yang perlu dilakukan agar SPLN dapat mewujudkan PMD diantaranya dengan Proyeksi kekuatan TNI AL dalam bentuk operasi laut yang merupakan kegiatan penangkalan dan pengendalian laut dengan tujuan untuk mengamankan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Peningkatan kebutuhan pengamanan secara keseluruhan, kehadiran unsur-unsur kekuatan TNI AL di perairan Indonesia dinilai sangat penting sebagai bentuk pengendalian laut dan penguasaan ruang udara di atasnya, untuk menjamin penggunaan dan pengelolaan potensi laut guna kepentingan nasional dan mencegah penggunaan oleh pihak lain atau pihak-pihak yang dapat merugikan negara. Sarana prasarana pengendalian laut berupa kapal, pesawat udara, radar pantai, pelabuhan dengan segala fasilitasnya, serta komunikasi merupakan

unsur utama yang harus dimiliki TNI AL dan institusi bidang kelautan. Unsur utama yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian laut, digunakan untuk mampu mengawasi, mendeteksi, mengarahkan dan menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut.

Banyaknya institusi yang berkepentingan di laut dan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan peraturan dalam pengamanan di laut menjadi kendala yang perlu menjadi perhatian khusus. Sikap ego sektoral merupakan persoalan krusial yang sampai saat ini belum terselesaikan. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran dan kerjasama antara Kementerian dan Lembaga pemerintah serta unsur maritim lainnya yang terkait dengan perwujudan pilar-pilar PMD. Merumuskan SPLN TNI AL agar tidak terbatas hanya dalam aspek operasional penangkalan dan pengendalian laut saja, tetapi juga aktif dalam bidang lain sesuai visi PMD.

TNI AL meningkatkan perannya, menggunakan kekuatan TNI AL untuk melakukan berbagai kegiatan diplomasi maritim dengan seluruh negara-negara perbatasan. Diplomasi maritim, hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan luar negeri dari pemerintah, karena tujuan

yang hendak dicapai, menyangkut hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Diplomasi maritim adalah salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL, dalam rangka Confidence Building Measures (CBM). Oleh karena itu, kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan dengan muhibah, patroli terkoordinasi, tugas perdamaian, latihan bersama diharapkan dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka diplomasi maritim mampu mengurangi intensitas pelanggaran di laut yurisdiksi nasional Indonesia seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran. Meningkatkan peran serta Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) menjalin koordinasi antar TNI dan Polri serta pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan PMD terutama yang terkait dengan pemerintah daerah.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan visi yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didorong dari kesadaran akan konstelasi geografis Indonesia yang berada pada persimpangan lalu lintas dunia, baik darat, udara, maupun laut. Indonesia juga

berbatasan dengan banyak negara di Asia yang sedang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa seperti China, India, dan Thailand. Selain itu, Indonesia berada pada persilangan perekonomian dan perdagangan internasional, baik negara-negara industri maju maupun negara-negara industri berkembang.¹⁸

Mengacu pada konsep strategi oleh Arthur F. Lykke (1997) dikatakan bahwa strategi merupakan penjabaran dari adanya *Ends* yaitu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, *Ways* atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dan *Means* atau sarana dan sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan,¹⁹ maka visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan *Ends*, sedangkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara merupakan salah satu dari sekian banyak cara atau *Ways* untuk mewujudkan visi tersebut.

Penerapan SPLN terhadap pilar PMD yaitu membangun Budaya Maritim. Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” sebagai kerangka pikir TNI AL menekankan bahwa pertahanan negara di laut meliputi segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dengan mengikutsertakan seluruh warga

negara dalam usaha pertahanan negara di dan atau lewat laut.²⁰ Doktrin tersebut menekankan bahwa seluruh masyarakat diharapkan secara aktif ikut serta dalam upaya pertahanan negara, termasuk pertahanan negara di laut. Salah satu perwujudan doktrin tersebut adalah dengan membangun budaya maritim khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

Kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam membangun budaya maritim merupakan salah satu bentuk kesemestaan dalam pertahanan negara di laut. Pentingnya pemahaman akan budaya maritim khususnya pada masyarakat pesisir tersebut telah menjadi salah satu prioritas TNI AL sejak sebelum dicanangkannya visi Indonesia Poros Maritim Dunia. Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) merupakan salah satu metode yang ditempuh oleh TNI AL dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan laut agar pemberdayaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat pesisir sebagai salah satu komponen bangsa dalam upaya pertahanan negara di laut. Selain Bindesir, menurut petunjuk pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, terdapat beberapa metode lain seperti

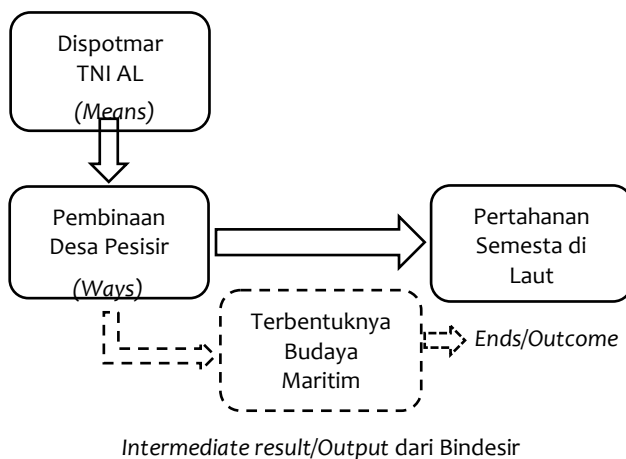
¹⁸ Limbong, B. 2015. Poros Maritim. Margaretha Pustaka, Jakarta.

¹⁹ Lykke, Arthur F, 1997. “*Defining Military Strategy*” dalam *Military Review* No 77 Vol 1.

²⁰ Markas Basar TNI AL. 2001. Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya. Mabes TNI AL, Jakarta.

Operasi Bhakti TNI AL, Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, Bhakti Sosial Kesehatan dan Mobile Market.²¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun tugas utama TNI AL sebagai komponen utama dalam upaya pertahanan Negara di laut, ikut terlibat dalam membangun budaya maritim termasuk salah satu upaya dalam pertahanan semesta di laut. Mengacu pada teori strategi yang disampaikan oleh Lykke bahwa dalam mengatur strategi diperlukan tujuan yang jelas (*ends*) maka pilar membangun budaya maritim yang dilakukan oleh TNI AL merupakan hasil antara (*intermediate result*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu pertahanan semesta di laut.



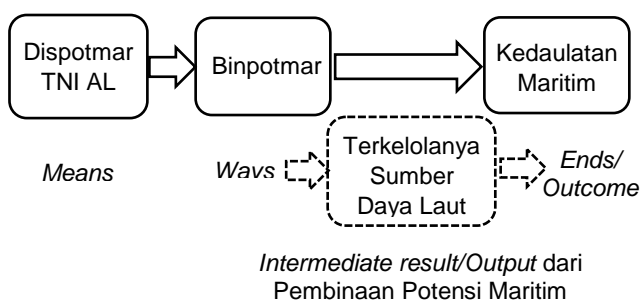
Gambar 2. Bagan *Ends-Ways* dan *Means* Pilarpertama PMD.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

TNI AL sebagai komponen utama sistem pertahanan negara di laut memiliki tugas salah satunya adalah membangun pertahanan semesta di laut seperti terlihat dalam gambar 2. Mengacu pada teori strategi, membangun pertahanan semesta di laut merupakan *Ends* atau tujuan yang perlu dicapai oleh TNI AL. Salah satu *Ways* atau cara yang dilakukan oleh TNI AL adalah dengan Pemberdayaan Wilayah Laut melalui program Pembinaan Desa Pesisir (Bindsir). Output dari program pembinaan desa pesisir atau Bindsir salah satunya adalah terbentuknya budaya maritim khususnya pada masyarakat pesisir di mana output tersebut merupakan salah satu pilar dalam Poros Maritim Dunia. Hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa meskipun membangun budaya maritim sebagai pilar pertama dalam PMD bukan merupakan tujuan dari strategi TNI AL, tetapi membangun budaya maritim juga menjadi perhatian bagi TNI Angkatan Laut karena terbangunnya budaya maritim akan menjadi pendukung tercapainya tujuan penting dari TNI AL yaitu membangun Pertahanan Semesta di Laut.

²¹ Markas Besar TNI AL, 2008. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, Mabes TNI AL. Jakarta

Pengelolaan Sumber Daya Laut dalam konsep penguasaan kekuatan laut (*sea power*) yang disampaikan oleh A.T Mahan bahwa salah satu strategi maritim adalah penguasaan laut, yaitu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan negara sendiri dan menutup peluang negara lain untuk menggunakannya, maka pilar ke dua dari visi Poros Maritim Dunia untuk mengelola sumber daya laut merupakan hal yang sesuai dengan konsep *Sea Power* tersebut. Pengelolaan sumber daya laut untuk kepentingan bangsa sendiri dan mencegah kemungkinan negara lain untuk menggunakannya, terlebih secara ilegal, adalah salah satu bentuk upaya untuk memelihara kedaulatan laut nusantara. Meskipun pengelolaan sumber daya laut bukan merupakan tugas utama dari TNI AL, namun hal tersebut menjadi perhatian bagi TNI AL melalui peningkatan peran pembinaan potensi maritim.

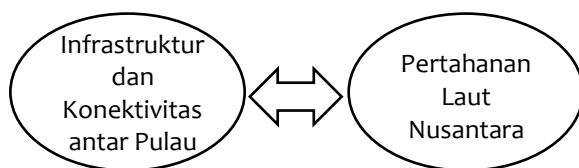


Gambar 3. Bagan *Ends- Ways* dan *Means* Pilar ke dua PMD
 Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

Gambar 3 mengilustrasikan bahwa meskipun pilar ke dua PMD yaitu mengelola sumber daya laut bukan merupakan tugas utama dan tujuan dari strategi TNI Angkatan Laut, namun terkelolanya sumber daya laut oleh bangsa sendiri adalah salah satu hasil antara (*intermediate result*) pembinaan potensi maritim sebagai *Ways* dalam strategi untuk membangun kedaulatan maritim. Untuk mewujudkan *Ends* tersebut, TNI AL selain memiliki Dinas Pembinaan Potensi Maritim juga secara aktif berkontribusi dalam membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, serta upaya pengendalian laut dan memastikan bahwa penggunaan laut untuk kepentingan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh pihak lawan/asing, serta menghapus ilegal fishing.

Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Pulau dalam Pilar ke tiga pada Poros Maritim Dunia adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh Indonesia untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan

konektivitas antar pulau bukan merupakan domain dari TNI AL semata, namun demikian TNI AL berkontribusi dengan menjaga dan turut membangun serta memberikan saran masukan terkait infrastruktur dan konektivitas maritim dengan menyelaraskan pembangunan ruang pertahanan secara berdampingan. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dengan Pertahanan Laut Nusantara memiliki hubungan saling mempengaruhi. Tanpa didukung oleh sistem pertahanan laut yang baik, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula upaya pertahanan laut perlu didukung oleh infrastruktur dan konektivitas antara pulau.



Gambar 4. Bagan Hubungan Pilar Ketiga PMD dengan Pertahanan Laut Nusantara
Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

Penerapan SPLN pada pilar ketiga PMD ini adalah pengendalian laut untuk menjaga keamanan bagi otoritas pengguna laut selama pelayaran. Hal tersebut sesuai dengan teori A.T Mahan yang menjelaskan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, suatu bangsa harus

dapat menguasai kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingannya yang lebih luas lagi. Menurut Mahan *Sea Power* bukan hanya kekuatan Angkatan Laut tetapi juga kombinasi antara armada kapal dagang yang berkembang dan kekuatan Angkatan Laut sebagai pelindungnya dari segala kegiatan di darat dan di laut yang saling mendukung diantara keduanya. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Marsetio bahwa untuk mewujudkan kejayaan di laut setidaknya terdapat tiga sasaran utama yang harus dicapai yaitu terwujudnya karakter bangsa maritim, terciptanya keunggulan sumber daya manusia (SDM) maritim dan berkembangnya ekonomi maritim.²²

Peran diplomasi dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Peran ketiga adalah diplomasi angkatan laut yang dilaksanakan dengan cara yang positif

²² Marsetio, 2014. *Sea Power Indonesia*. Universitas Pertahanan, Jakarta

melalui interaksi dan kerja sama dengan negara sahabat. Latihan dan operasi, pertukaran personel, maupun forum-forum kerja sama multilateral merupakan wadah untuk melaksanakan diplomasi angkatan laut untuk mendukung politik luar negeri pemerintah.

Strategi pencapaian pilar ke dua dari visi Indonesia Poros Maritim Dunia, yang menjadi *Ends* dari strategi tersebut adalah berjalannya diplomasi maritim. Modal penting adalah *Means* yang telah dimiliki bangsa Indonesia dalam pencapaian *Ends* tersebut adalah atensi dari negara-negara tetangga untuk menjalin kerja sama yang baik. Selain itu, yang termasuk *Means* dalam pencapaian strategi diplomasi maritim adalah keikutsertaan TNI Angkatan Laut dalam kegiatan *Navy to Navy Talk (NTNT)*. *Ways* atau cara yang dilakukan untuk tercapainya diplomasi maritim adalah dengan kegiatan bersama negara sahabat dalam hal ini Angkatan Laut negara sahabat seperti kegiatan *NTNT*, *symposium*, *workshop*, *port visit*, dan misi PBB. Meningkatkan diplomasi maritim dapat dilakukan melalui operasi muhibah, Patkor (patroli terkoordinasi), Latma (latihan bersama), operasi misi PBB atau *Maritime Task Force (MTF)*.

Pertahanan Maritim dalam Pilar ke lima PMD adalah pertahanan maritim,

pilar ini lebih tajam jika diterjemahkan sebagai kedaulatan wilayah laut, pertahanan maritim merupakan syarat mutlak agar NKRI dapat menjadi poros maritim dunia. Hal penting terkait dengan kedaulatan negara di laut mencakup dua hal penting yaitu penyelesaian batas laut Indonesia dan pertahanan maritim.²³ Jika dibandingkan dengan pilar-pilar lain dalam PMD, pilar ke lima merupakan pilar yang paling relevan dengan fungsi TNI AL, sehingga Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang dimiliki oleh TNI AL secara keseluruhan dapat digunakan sebagai *Ways* atau cara untuk dapat mewujudkan pertahanan maritim sebagai *outcome*-nya.

Dalam mewujudkan pertahanan maritim pada masa damai terdapat dua elemen strategis yaitu Strategi Penangkalan (*deterrence*) adalah penggunaan kekuatan pertahanan laut untuk meyakinkan pihak lain bahwa penggunaan kekuatan untuk mengancam kepentingan nasional Indonesia tidak akan berhasil atau sia-sia untuk dilakukan karena kerugian dan resiko yang dihadapi tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Strategi penangkalan

²³ Widodo. J.. 2014. Pidato pada KTT ke-9 East Asia Summit. Nay Pyi Taw, Myanmar.

membutuhkan kekuatan pertahanan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi yang bertumpu pada kekuatan militer yang handal dan disegani, serta kebijakan pemerintah yang tegas dan akuntabel dalam penggunaan kekuatan pertahanan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Singkatnya kredibilitas penangkalan adalah kombinasi dari kemampuan dan keinginan. Kedua faktor tersebut harus dipahami oleh pihak lain untuk mencegah potensi ancaman terhadap Indonesia. Dalam pertahanan maritim kredibilitas kemampuan untuk melakukan penangkalan dapat dibentuk dengan membangun kekuatan pertahanan baik dari aspek teknologi, daya pukul, maupun daya gerak. Kemampuan pertahanan yang handal menjadi daya tangkal pertahanan melalui penggelaran operasi laut sebagai bentuk kehadiran (*presence*), baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk *show of force* kemampuan kekuatan pertahanan Indonesia. Kredibilitas penangkalan juga dapat dibangun melalui keterlibatan aktif satuan TNI dalam operasi perdamaian dunia, latihan dan patroli bersama dengan negara lain, maupun kegiatan pertukaran personel dalam pendidikan dan latihan yang dapat

menjadi indikasi kemampuan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Strategi Pengendalian laut merupakan strategi untuk menjamin penggunaan laut bagi kepentingan nasional Indonesia dan mencegah pihak lain/lawan menggunakan laut untuk kepentingannya. Sebagai implikasinya, nilai dari pengendalian laut adalah untuk memungkinkan penggunaan laut oleh pihak sendiri untuk melindungi sumber daya di masa damai dan mencegah pihak lain/musuh menggunakan laut untuk kepentingannya. Aplikasi dari strategi penangkalan laut dilaksanakan sesuai dengan perbandingan kekuatan relatif dengan kekuatan lawan, batasan waktu dan tempat, serta tujuan pengendalian laut itu sendiri. Secara operasional, pengendalian laut dapat dilaksanakan secara ofensif maupun defensif melalui berbagai aksi taktis dalam operasi gabungan yang menggunakan komponen kekuatan TNI secara terintegrasi.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan SPLN yang ada, tanpa penyesuaian, telah mampu menjadi pendukung, bahkan menjadi komponen kunci untuk terwujudnya pilar ke empat dan pilar ke lima PMD. Selain adanya kepentingan yang sama antara SPLN dengan pilar ke empat dan ke lima PMD,

SPLN juga mampu menjadi pendukung bagi terwujudnya pilar ke 3 yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Upaya penerapan dari SPLN yang memiliki *Ends* atau tujuan akhir untuk membangun pertahanan negara di laut akan secara langsung memiliki dampak positif pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. SPLN melalui operasi laut sehari-hari sebagai salah satu strateginya, akan turut mendukung upaya pembangunan infrastruktur.

Kesimpulan

Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia meliputi pelibatan satuan kerja Dispotmar TNI AL dan instansi terkait termasuk Kementerian dan Lembaga pemerintah. Pilar PMD menjadi salah satu hasil antara (*intermediate result*) dari tugas TNI AL, tapi bukan termasuk dalam sasaran SPLN. SPLN hanya dapat mewujudkan pilar ke empat dan pilar ke lima. Pilar PMD yang tidak dapat secara langsung diwujudkan melalui SPLN dapat dilaksanakan melalui peran dan fungsi TNI AL secara umum.

Penerapan Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia dimana penerapan SPLN

saat ini terbatas pada bidang strategi operasi yang sarannya khusus pengamanan laut dalam rangka mencegah niat dari pihak lain yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, sedangkan untuk mewujudkan pilar-pilar yang terdapat pada PMD tidak cukup hanya dengan menggelar operasi tetapi juga dibutuhkan kegiatan selain dalam bentuk operasi pembinaan potensi maritim. Pilar PMD dan SPLN saling mendukung. Pola keterkaitan ini ditunjukkan pada pilar ke tiga PMD yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau tidak akan berjalan baik tanpa didukung pertahanan dan keamanan maritim, sehingga SPLN yang memiliki *ends* atau tujuan membangun pertahanan dan menjaga kedaulatan maritim menjadi elemen penting bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Demikian juga sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Basri Mustari. Mahasiswa Universitas Pertahanan 2017 Fakultas Strategi Pertahanan, Prodi Strategi Perang Semesta
- Supartono. Wakil Rektor 2 Universitas Pertahanan 2018. Pembimbing 1

- Rayanda Barnas. *Analisis Madya Satwas* Universitas Pertahanan 2018. Pembimbing 2
- Clausewitz, Carl von. 1984. *On War*. (Terj. dari *Vom Kriege*. Princeton University Press. Michael Howard dan Peter Paret). New York: Oxford University Press.
- Lykke, Arthur F, 1997. "Defining Military Strategy" dalam *Military Review* No 77 Vol. 1
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015. *Strategi Pertahanan Negara Indonesia*. Kemhan RI, Jakarta.
- Lipi, 2015. *Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia 2015* pada <http://lipi.go.id> di akses pada September 2018.
- Limbong, B. 2015. *Poros Maritim*. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Joko Widodo, 2014. *Deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar* pada <https://www.kemlu.go.id> di akses pada 5 Oktober 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Jakarta.
- Markas Besar TNI AL. 2004. *Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)* Mabes TNI AL, Jakarta
- Craig and Grant, 1996. *Manajemen Strategi*. Alex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Pearce II, Robinson 2008. *Manajemen Strategis*. Salemba Empat, Jakarta
- David, F. R, 2011. *Strategic Management*. Buku 1. Edisi 12. Salemba Empat, Jakarta
- Marsetio, 2014. *Sea Power Indonesia*. Universitas Pertahanan, Jakarta.
- Corbett, J. S. 2015. *Some Principles of Maritime Strategy*. Middletown, USA
- Undang-undang R I Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Limbong, B. 2015. *Poros Maritim*. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Markas Basar TNI AL. 2001. *Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya*. Mabes TNI AL, Jakarta.
- Markas Besar TNI AL, 2008. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut*, Mabes TNI AL. Jakarta
- Widodo. J.. 2014. *Pidato pada KTT ke-9 East Asia Summit*. Nay Pyi Taw, Myanmar.

